

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Perubahan iklim merupakan isu yang menjadi perhatian negara-negara di dunia dan memerlukan kerja sama global dalam menanganinya. Untuk menanggapi isu ini, negara-negara di dunia telah melakukan tindakan serius termasuk di dalamnya penyelenggaraan COP 21 di Paris yang menghasilkan Perjanjian Paris pada tahun 2015. Sebanyak 196 pihak telah mengadopsi Perjanjian Paris, termasuk Tiongkok. Pada tahun 2016, Tiongkok secara resmi meratifikasi Perjanjian Paris.

Sebelum Perjanjian Paris, Tiongkok merupakan negara yang enggan dalam membuat komitmen konkrit terkait perubahan iklim dikarenakan Tiongkok lebih fokus pada pembangunan ekonomi. Tiongkok juga merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia dan sejalan dengan hal tersebut, emisi GHG Tiongkok juga merupakan yang tertinggi di dunia. Ratifikasi Perjanjian Paris berpotensi mengganggu perekonomian Tiongkok dikarenakan Tiongkok harus membatasi emisinya sesuai tujuan Perjanjian Paris. Selanjutnya, Perjanjian Paris pada dasarnya tidak memiliki keuntungan timbal balik yang nyata seperti perjanjian dagang maupun perjanjian *arms control* bagi Tiongkok. Ratifikasi Perjanjian Paris didorong oleh faktor gagasan, ide, maupun norma yang ada di tingkat sistem, masyarakat, dan pembuat kebijakan Tiongkok. Hal ini dijelaskan melalui konsep *Environmental Foreign Policy Analysis* oleh Paul G. Harris yang menjelaskan faktor pendorong pengambilan kebijakan luar negeri lingkungan hidup oleh negara.

Faktor pendorong Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris adalah gagasan, ide, dan norma yang ada di tingkat sistem, masyarakat, dan pembuat kebijakan. Pada tingkat sistem, ratifikasi Perjanjian Paris didorong oleh gagasan, ide, atau norma sistemik seperti komunitas epistemik yang membangun narasi dampak negatif perubahan iklim, perubahan norma CBDR terkait perubahan iklim, serta identitas Tiongkok sebagai negara besar yang bertanggung jawab dalam tata kelola global. Di tingkat masyarakat, dorongan berasal dari ide dan gagasan pelaku bisnis energi terbarukan yang mempromosikan konsep *ecological civilization*, pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, keamanan energi dan kemandirian energi, serta kepemimpinan global Tiongkok. Narasi-narasi ini dibangun melalui forum lobi bersama pembuat kebijakan serta dipromosikan melalui media resmi Partai Komunis Tiongkok. Di tingkat negara, pengambilan kebijakan dipengaruhi oleh ide dan gagasan para ahli serta para akademisi yang mendorong gagasan bahwa setiap kebijakan iklim di Tiongkok harus selalu didasarkan pada penelitian dan data ilmiah terpercaya. Hal ini memungkinkan kebijakan iklim Tiongkok tidak hanya dapat dilaksanakan dengan efektif, tetapi juga selaras dengan citra Tiongkok sebagai pemimpin global dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Ide dan gagasan dari para ahli serta akademisi merupakan faktor pendorong utama yang mempengaruhi ratifikasi Perjanjian Paris oleh Tiongkok. Kontribusi mereka terbukti sangat signifikan karena mereka memiliki akses langsung ke pembuat kebijakan, sehingga mampu memengaruhi proses pengambilan keputusan secara lebih mendalam dan tepat sasaran. Tidak hanya memberikan saran ilmiah, para akademisi dan ahli ini juga berperan dalam menyusun kebijakan

yang berbasis pada penelitian ilmiah yang dapat dilaksanakan secara efektif. Karena akses ini, kebijakan iklim yang diadopsi selaras dengan citra Tiongkok sebagai pemimpin global dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Faktor-faktor tersebut menjadi pendorong Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris meskipun dengan meratifikasi Perjanjian Paris, Tiongkok harus membatasi penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara sebagai bahan bakar utama penunjang ekonomi Tiongkok sekaligus sebagai faktor penyumbang emisi GHG Tiongkok. Perjanjian Paris juga bukan merupakan perjanjian yang memiliki keuntungan timbal balik langsung yang nyata untuk Tiongkok. Mengurangi penggunaan batu bara dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih memerlukan investasi besar dan restrukturisasi industri yang signifikan merupakan tantangan yang Tiongkok hadapi ketika meratifikasi Perjanjian Paris.

5.2. Saran

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga disarankan agar penelitian di masa depan meneliti lebih dalam mengenai faktor pendorong Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris dengan fokus pada kerangka teori berbasis kognitif atau konstruktivisme. Penelitian selanjutnya harus memperdalam teori dengan mengeksplorasi peran ide, gagasan, dan norma dalam proses ratifikasi ini, baik di tingkat sistemik, masyarakat, maupun pembuat kebijakan. Selanjutnya, pengumpulan data empiris yang lebih banyak dan beragam sangat diperlukan. Penggunaan metode seperti wawancara mendalam dengan aktor yang terlibat sangat dianjurkan. Aktor yang dapat diwawancarai termasuk komunitas epistemik, akademisi, serta ENGO (Environmental Non-Governmental Organizations) terkait. Hal ini akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan

pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana ide, gagasan, dan norma mempengaruhi keputusan Tiongkok untuk meratifikasi Perjanjian Paris.

Dengan saran-saran ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam memahami faktor-faktor kognitif dan konstruktivis yang mendorong Tiongkok meratifikasi Perjanjian Paris. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran ide, gagasan, dan norma dalam pembentukan kebijakan lingkungan global.

